



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARLIN ARIESTA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 669207

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/225 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 B65/SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XMAX XMAX C Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 C Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 388.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.545.800.000

III. HUTANG Rp. 174.669.161

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.371.130.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.